

PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN DI DAERAH PERBATASAN: STUDI KASUS TENAGA KERJA WANITA DI KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT

Gabrielle Priscilla Wijaya, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Gabrielle Priscilla Wijaya

Abstract.

The increase in the quantity of TKI (Indonesian workers) who work in other countries is the result of a lack of employment opportunities within the country. This causes many Indonesians to choose to work abroad, including in border areas such as Sambas Regency, West Kalimantan. In the West Kalimantan border region, employment issues are increasingly complicated. This is due to many components, one of which is the domestic employment deficit. Information published by the Central Statistics Agency (BPS) shows that the Open Unemployment Rate (TPT) in February 2023 is up to 5.4%, facing a decline of 0.38% in comparison with February 2022. Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI) is firmly determined to maintain the safety of Indonesian migrant workers in Sambas Regency and other districts. Thus, this research can help determine the extent to which the implementation of these regulations contributes to protecting migrant workers, especially female workers in areas adjacent to West Kalimantan. The following studies are categorized as normative juridical legal studies. In this research, analysis was carried out on library materials or secondary data as the main source of information for conducting research. The approach used includes searching and reviewing literature that is relevant to the problem or research material being studied. The results of the research are that 1. The high level of unemployment in the country, limited employment opportunities, and economic developments in neighboring countries such as Malaysia are the main factors influencing the decision of female workers in Sambas Regency to serve abroad. The high level of poverty makes migrant workers an attractive alternative for the residents of Sambas Regency.

Keywords: limited employment opportunities, Border Areas, Migrant Workers

PENDAHULUAN

Peningkatan kuantitas TKI (tenaga kerja Indonesia) yang giat bekerja di negara lain adalah hasil dari kekurangan peluang pekerjaan di dalam negeri.¹ Hal ini menyebabkan banyak orang Indonesia memilih untuk bekerja di luar negeri, termasuk di daerah perbatasan seperti Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di wilayah

¹ Rahmany, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja di Luar Negeri Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 51-73.

perbatasan Kalimantan Barat, isu ketenagakerjaan semakin rumit.² Ini lantaran karena sejumlah komponen, di antaranya defisit lapangan kerja di dalamnya negeri. Infomrasi yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di bulan Februari 2023 hingga 5,4%, menghadapi penyusutan sebanyak 0,38% skor jika dalam perbandingan dengan Februari 2022.³ Angka ini masih di atas target 6% yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴ Ketersediaan lahan yang terbatas. Kalimantan Barat adalah satu dari provinsi di Indonesia yang mempunyai zona paling luas.⁵ Namun, sebagian besar wilayahnya merupakan hutan dan perkebunan. Hal ini menyebabkan ketersediaan lahan untuk pertanian dan peternakan terbatas.

Perkembangan ekonomi di negara tetangga. Malaysia merupakan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sambas. Perkembangan ekonomi di Malaysia yang lebih pesat dibandingkan dengan Indonesia menyebabkan banyak warga Indonesia tertarik untuk bekerja di sana.⁶

Di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, kendala tenaga kerja juga muncul karena para pekerja ini membawa manfaat ekonomi ke daerah pedesaan sambil menghadirkan revolusi dalam masyarakat pada keluarga yang ditinggalkan, khususnya terhadap mereka dimana berhasil pada pekerjaan mereka. Akan tetapi, terhadap pekerja lain yang kurang bernasib baik, terlihat pengalaman melakukan kerja pada luar negeri tidaklah sejalan pada ekspetasi serta janji yang diberikan dari agen tenaga kerja.

Penjelasan di atas mencerminkan kerumitan permasalahan ketenagakerjaan di daerah berbatasnya Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Sambas. Faktor-faktor seperti kurangnya lapangan kerja di dalam negeri, ketersediaan lahan yang terbatas, dan perkembangan ekonomi di negara tetangga seperti Malaysia, telah menyebabkan sejumlah besar penduduk Indonesia memutuskan untuk mencari pekerjaan di negara lain. Namun, di tengah keberhasilan beberapa tenaga kerja dalam membawa manfaat ekonomi ke daerah pedesaan dan menyebabkan perubahan sosial, ada juga yang menghadapi tantangan besar. Hal ini membuat permasalahan pekerja migran, terutama pekerja perempuan di Kabupaten Sambas, perlu mendapatkan penelitian lebih lanjut.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa Indonesia telah memiliki beberapa peraturan hukum yang terkait dengan pekerja migran, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang

² Huruswati, I. (2006). Permasalahan Pekerja Migran Di Daerah Perbatasan: Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 1-14.

³ Badan Pusat Statistik. *Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,94 juta rupiah per bulan*. 5 Mei 2023.

⁴ Humas Fraksi PKS. *PKS Mendesak Pemerintah Serious Turunkan Angka Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023!!*. 20 Oktober 2022.

⁵ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). *Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat*. 8 September 2023.

⁶ PKRB, R. (2017). *Analisa Daya Saing dan Produktivitas Indonesia Menghadapi MEA*.

Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan. Di lain sisi, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sudah bersikap tegas dalam menjaga keselamatan pekerja migran Indonesia pada Kabupaten Sambas serta kabupaten-kabupaten lainnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi sejauh mana implementasi peraturan-peraturan ini berkontribusi dalam melindungi pekerja migran, khususnya para pekerja wanita yang berada pada daerah berbatasannya Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Studi berikut terkategori pada studi hukum normative yuridis. Dalam studi ini, dilaksanakan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber informasi utama untuk melakukan penelitian. Pendekatan yang digunakan melibatkan penelusuran dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang relevan dengan masalah atau materi penelitian yang diteliti.⁷ Beberapa peraturan yang diterapkan melingkupi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di samping itu, tulisan ini juga menggali berbagai konsep hukum yang memiliki kaitan terhadap para pekerja migran, dimanamemiliki peran penting dalam pembentukan hukum di wilayah perbatasan. Proses pengumpulan sumber hukum utama, sumber hukum sekunder, serta sumber hukum tersier dilakukan melalui analisis literatur. Pengkajian materi hukum dilakukan dengan menerapkan metode interpretasi hukum, baik secara sistematis maupun ekstensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengangguran dan Kurangnya Lapangan Kerja di Dalam Negeri

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sambas di bulan Februari 2023 mencapai 5,45 persen, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah tenaga kerja yang tidak dapat ditempatkan di pasar kerja, mencerminkan pasokan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan secara efisien. Selain itu, tingginya TPT juga berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah karena kurangnya kontribusi dari tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Masalah dilalui dari Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada Kabupaten Sambas terutama disebabkan oleh pelaksanaan prosedur

⁷ Soerjono, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.

pemberangkatan yang ilegal.⁸ Bersamaan dengan berjalannya waktu, tantangan terkait tenaga kerja di wilayah perbatasan Kalimantan Barat semakin rumit.

Tenaga kerja di Kabupaten Sambas telah menetapkan untuk bekerja di luar negeri menghasilkan pengaruh yang baik, termasuk kontribusi ekonomi yang mengalir kembali ke desa mereka dan adanya perubahan sosial di keluarga yang mereka tinggalkan. Sayangnya, tidak semua pekerja beruntung, dan seringkali mereka mengalami ketidaksesuaian antara ekspektasi dan janji yang diberikan oleh agen tenaga kerja tentang pengalaman bekerja di luar negeri. Dengan kata lain, tingkat pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Sambas memiliki potensi untuk memengaruhi keputusan tenaga kerja wanita demi mengincar kerja pada negeri luar. Namun, masalah yang lebih mendalam muncul dalam bentuk praktik pemberangkatan ilegal, dan pengalaman pekerja di luar negeri sangat bervariasi, dengan dampak sosial dan ekonomi yang beragam pada keluarga yang ditinggalkan.

Ketersediaan Lahan yang Terbatas

Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat memiliki ketersediaan lahan yang terbatas, yang mempengaruhi pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja wanita di daerah perbatasan. Berikut adalah beberapa dampak dari ketersediaan lahan yang terbatas di Kabupaten Sambas:

- a. Terbatasnya lahan pertanian. Kabupaten Sambas memiliki potensi untuk menjadi daerah penghasil komoditas pertanian, seperti perkebunan kopi.⁹ Namun, ketersediaan lahan yang terbatas dapat membatasi jumlah lahan pertanian yang tersedia, sehingga dapat mempengaruhi pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja wanita di sektor pertanian.
- b. Terbatasnya lahan permukiman. Ketersediaan lahan yang terbatas juga dapat mempengaruhi pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja wanita di sektor permukiman. Kabupaten Sambas memiliki kawasan perkotaan yang telah menjadi pusat permukiman selama lebih dari tiga abad delapan puluh tahun.¹⁰ Namun, terbatasnya lahan dapat membatasi jumlah lahan yang tersedia untuk pembangunan rumah dan infrastruktur permukiman.
- c. Terbatasnya lahan industri: Ketersediaan lahan yang terbatas juga dapat mempengaruhi pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja wanita di sektor industri. Kabupaten Sambas memiliki potensi untuk menjadi daerah

⁸ Huruswati, I. (2006). Permasalahan Pekerja Migran Di Daerah Perbatasan: Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 1-14.

⁹ Prihartini, N., & Surgani Firdania, M. (2023). Pemanfaatan Data Spasial Dalam Identifikasi Lahan Perkebunan Kopi Di Kabupaten Sambas. *Jurnal Patani: Pengembangan Teknologi Pertanian Dan Informatika*, 6(1), 18-23.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sambas Tahun 2020-2040.

penghasil komoditas pertanian dan industri.¹¹ Namun, terbatasnya lahan dapat membatasi jumlah lahan yang tersedia untuk pembangunan industri.

Dengan demikian, ketersediaan lahan yang terbatas di Kabupaten Sambas dapat mempengaruhi pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja wanita di daerah perbatasan. Terbatasnya lahan pertanian, permukiman, dan industri dapat membatasi jumlah pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja wanita di sektor-sektor tersebut.

Perkembangan Ekonomi di Negara Tetangga

Perkembangan ekonomi di negara tetangga seperti Malaysia tidak secara langsung memengaruhi minat dan keputusan perempuan pekerja di Kabupaten Sambas yang bekerja di luar negeri. Namun, aspek-aspek ekonomi sosial seperti tingkat upah serta kepemilikan lahan dapat mempengaruhi waktu kerja petani wanita di Sambas.¹² Meskipun perkembangan ekonomi di negara tetangga seperti Malaysia tidak berdampak langsung pada minat dan pilihan perempuan tenaga kerja di Kabupaten Sambas untuk mencari pekerjaan di luar negeri, namun, perlu dicatat bahwa faktor-faktor sosial ekonomi seperti tingkat upah yang lebih tinggi di luar negeri dan kepemilikan lahan yang terbatas di Sambas dapat memiliki dampak signifikan pada keputusan mereka. Tingkat upah yang lebih besar di luar negeri dapat memberikan insentif yang kuat bagi petani wanita untuk mencari pekerjaan di luar negeri guna meningkatkan pendapatan mereka dan keluarga. Di sisi lain, kepemilikan lahan yang terbatas di Sambas dapat membatasi peluang pekerjaan di sektor pertanian lokal, mendorong mereka untuk mencari alternatif pekerjaan pada negeri luar. Maka dari itu, komponen-komponen ini bersama-sama memainkan peran penting dalam dinamika tenaga kerja wanita di Kabupaten Sambas yang memilih untuk kerja di negeri luar.

Peningkatan keterlibatan perempuan muda Indonesia Malay dalam migrasi tenaga kerja juga telah mempengaruhi pola pernikahan dan keluarga baru.¹³ Peningkatan keterlibatan perempuan muda Indonesia Malay dalam migrasi tenaga kerja memiliki dampak yang signifikan pada pola pernikahan dan pembentukan keluarga baru. Ketika perempuan muda ini memutuskan

¹¹ Prihartini, N., & Surgani Firdania, M. (2023). Pemanfaatan Data Spasial Dalam Identifikasi Lahan Perkebunan Kopi Di Kabupaten Sambas. *Jurnal Patani: Pengembangan Teknologi Pertanian Dan Informatika*, 6(1), 18-23.

¹² Huruswati, I. (2006). Permasalahan Pekerja Migran Di Daerah Perbatasan: Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 1-14.

¹³ Yuliati, D. (2019). Latar belakang pemilihan Jepang dan Korea sebagai negara tujuan TKI: Studi kasus di Desa Wonorejo Kabupaten Sragen. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Sosiologi dan Antropologi.

untuk bekerja di luar negeri, seringkali mereka harus menjalani periode pemisahan jarak jauh dari pasangan atau calon pasangan mereka. Hal ini dapat mengubah dinamika hubungan dan waktu yang dihabiskan bersama, sehingga mempengaruhi rencana pernikahan dan pembentukan keluarga. Selain itu, pengalaman bekerja di luar negeri juga dapat membentuk pandangan perempuan muda ini tentang peran gender dalam keluarga dan masyarakat, yang dapat memengaruhi ekspektasi mereka terhadap pernikahan dan peran dalam keluarga baru mereka setelah kembali dari migrasi. Sebagai hasilnya, migrasi tenaga kerja perempuan muda menjadi faktor yang memainkan peran penting dalam transformasi sosial dan budaya, terutama dalam konteks pernikahan dan keluarga di komunitas Indonesia Malay.

Pada konteks di sini, perkembangan ekonomi di negara tetangga seperti Malaysia memainkan peran yang penting dalam dinamika tenaga kerja wanita di Kabupaten Sambas. Meskipun pengaruhnya tidak bersifat langsung, aspek-aspek sosial ekonomi yakni perbedaan tingkat upah antara Malaysia serta Sambas serta ketersediaan peluang kerja lokal yang terbatas dapat menjadi motivasi kuat bagi perempuan pekerja yang mencari pekerjaan di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di negara tetangga dapat memiliki dampak signifikan pada keputusan migrasi mereka, yang pada gilirannya memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di wilayah Kabupaten Sambas.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Dampak sosial serta ekonomi yang disulutkan oleh perempuan pekerja yang berhasil di luar negeri terhadap keluarga yang ditinggalkan di Kabupaten Sambas telah menjadi subjek penelitian dalam beberapa studi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Raja, pendapatan yang diperoleh oleh perempuan pekerja di luar negeri bisa dipakai demi terpenuhinya keperluan keseharian keluarga yang ditinggalkan, seperti pakaian, makanan, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur rumah, dan lain sebagainya.¹⁴ Di samping itu, peningkatan pendapatan dan tingkat hunian yang lebih baik juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan. Namun, dampak negatif juga bisa terjadi, seperti hubungan keluarga yang menjadi kurang harmonis.

Penelitian lain di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas menunjukkan bahwa terdapat penurunan minat masyarakat sebagai pekerja wanita pada negeri luar.¹⁵ Hal tersebut terjadi karena ada kesadaran tentang risiko yang dihadapi oleh pekerja perempuan di luar negeri, seperti eksploitasi, pelecehan,

¹⁴ Anggraini, P., & Monanisa, Y. A. (2020). Dampak Tkw Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Yang Ditinggalkan Di Kecamatan Tanjung Raja. *Jurnal Swarnabhumi*, 5(1).

¹⁵ Astari, Z. (2016). Migrasi Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Ke Luar Negeri Di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas. *Sociologique: Jurnal Sosiologi*, 4(1).

dan kekerasan. Walaupun begitu, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa perempuan pekerja yang sukses di luar negeri dapat membawa perubahan sosial yang positif bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka dapat mengalirkan nilai ekonomi kembali ke desa mereka dan membawa perubahan yang menguntungkan bagi keluarga yang mereka tinggalkan.

Dalam penelitian lain di Kabupaten Sambas, komponen-komponen yang memiliki pengaruh determinasi TKI (Tenaga Kerja Wanita) untuk bertugas di luar negeri antara lain adalah demi memperbaiki perekonomian keluarga serta tingginya tingkat pengangguran di daerah.¹⁶ Maka daripada itu, keberhasilan pekerja wanita dalam pekerjaannya pada negeri luar dapat memberikan dampak positif bagi keluarga yang ditinggalkan, seperti terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga, peningkatan penghasilan, perubahan tempat tinggal yang lebih baik, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga

Pelaksanaan Peraturan Hukum

Sejumlah peraturan hukum serta UU sudah diciptakan demi menyerahkan asilum terhadap pekerja migran Indonesia, terutama perempuan buruh, yang berdinan di luar negeri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi landasan hukum yang menyerahkan asilum hukum yang kuat guna buruh migran Indonesia pada manapun mereka bekerja. Undang-undang ini juga menetapkan kewajiban bagi pemerintah, perusahaan penempatan, dan pihak-pihak terkait untuk melindungi hak-hak buruh migran Indonesia.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merinci tata cara pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia, termasuk perempuan pekerja, dimana berdinan pada luar negeri. Peraturan tersebut menjelaskan bagaimana undang-undang yang lebih umum, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, harus diimplementasikan secara praktis.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia memberikan agunan kemasyarakatan bagi buruh migran Indonesia, termasuk perempuan pekerja, yang berdinan pada luar negeri. Jaminan sosial tersebut mencakup berbagai aspek, missal agunan keamanan, agunan bencana tugas, agunan agenda lanjut usia, dan agunan purnabakti, yang bertujuan untuk memproteksi seluruh hak buruh migran.

Selain regulasi yang semacam khusus mengatur pekerja migran, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menghibahkan proteksi terhadap seluruh tenaga kerja, termasuk buruh wanita,

¹⁶ Auliya, G. (2022). Faktor-Faktor Pekerja Migran Indonesia Bekerja Di Luar Negeri: Studi Kasus Kabupaten Sambas. *Skripsi*. Universitas Tanjungpura, Indonesia.

di Indonesia. UU ini menetapkan seluruh hak buruh, misal hak terhadap upah, hak terhadap perlindungan serta keamanan tanggung jawab, serta hak atas jaminan sosial.

Namun, meskipun peraturan-peraturan ini telah ada, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi termasuk prosedur pemberangkatan secara ilegal, tingkat kesadaran yang rendah akan risiko yang dihadapi oleh buruh wanita pada luar negeri, dan minimnya persyaratan serta proteksi dimana memadai. Demikian, perlunya usaha dimana maksimal yang berasal dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak tenaga kerja wanita serta memperkuat perlindungan terhadap siapaun disini yang membuat pilihan untuk berdinis pada luar negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian masalah tentang buruh wanita pada Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, telah mengidentifikasi sejumlah perkara kompleks yang berkaitan dengan pekerja migran di wilayah perbatasan. Berikut sejumlah konklusi yang bisa dipetik berdasarkan observasi di atas:

1. Tingkat pengangguran yang tinggi di dalam negeri, keterbatasan lapangan kerja, dan perkembangan ekonomi di negara tetangga seperti Malaysia menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan tenaga kerja wanita di Kabupaten Sambas demi berdinis pada luar negeri. Tingginya pengangguran membuat buruh migran menjadi alternatif dimana menarik bagi warga Kabupaten Sambas.
2. Ketersediaan lahan yang terbatas di Kalimantan Barat membatasi peluang pekerjaan di sektor pertanian, permukiman, dan industri. Hal ini mendorong buruh wanita demi menelusuri profesi di luar negeri sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Perkembangan ekonomi di negara tetangga, seperti Malaysia, memberikan insentif berupa tingkat upah dimana di atas dibanding Indonesia, dimana memengaruhi minat buruh wanita demi berdinis pada luar negeri. Ini juga dapat memengaruhi pola pernikahan dan keluarga baru mereka.
4. Dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh buruh wanita yang sukses dalam pekerjaan pada luar negeri layak meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua tenaga kerja migran memiliki pengalaman yang sama, dan ada risiko eksploitasi dan kekerasan yang harus diperhatikan.
5. Meskipun sudah ada peraturan hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti prosedur pemberangkatan ilegal dan kurangnya kesadaran akan hak-hak pekerja migran. Diperlukan usaha lanjutan yang dilakukan negara serta warga negara untuk memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja wanita di Kabupaten Sambas.

Dengan merujuk kepada hasil akhir yang telah disebutkan sebelumnya, di bawah ini terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan:

1. Pemerintah perlu memperkuat inisiatif untuk menciptakan pekerjaan di dalam negeri guna mengurangi tingkat pengangguran dan merangsang perkembangan ekonomi daerah, terutama di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Sambas.
2. Diperlukan strategi untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan yang terbatas di Kalimantan Barat, termasuk upaya untuk diversifikasi sektor ekonomi lokal dan pengembangan lahan pertanian.
3. Pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan yang memperkuat kondisi pekerjaan dan penghasilan di dalam negeri agar lebih menarik bagi tenaga kerja wanita.
4. Perlindungan pekerja migran, khususnya tenaga kerja wanita, perlu diperkuat, termasuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pemberangkatan ilegal dan memberikan edukasi mengenai hak-hak mereka.
5. Diperlukan upaya untuk memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada keluarga yang ditinggalkan oleh pekerja migran, seperti program pelatihan dan pemberian informasi mengenai risiko dan hak-hak pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

- PKRB, R. (2017). *Analisa Daya Saing dan Produktivitas Indonesia Menghadapi MEA*.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sambas Tahun 2020-2040.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Anggraini, P., & Monanisa, Y. A. (2020). Dampak Tkw Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Yang Ditinggalkan Di Kecamatan Tanjung Raja. *Jurnal Swarnabhumi*, 5(1).
- Astari, Z. (2016). Migrasi Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Ke Luar Negeri Di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas. *SOCIOLOGIQUE: Jurnal Sosiologi*, 4(1).
- Auliya, G. (2022). Faktor-Faktor Pekerja Migran Indonesia Bekerja Di Luar Negeri: Studi Kasus Kabupaten Sambas. Skripsi. Universitas Tanjungpura, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,94 juta rupiah per bulan. 5 Mei 2023.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-->

- [tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html](https://fraksi.pks.id/2022/10/20/pks-mendesak-pemerintah-serius-turunkan-angka-pengangguran-terbuka-tpt-tahun-2023%E2%80%BC%E2%83%25%20per%20Februari%202022)
- Humas Fraksi PKS. PKS Mendesak Pemerintah Serius Turunkan Angka Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023!!. 20 Oktober 2022. <https://fraksi.pks.id/2022/10/20/pks-mendesak-pemerintah-serius-turunkan-angka-pengangguran-terbuka-tpt-tahun-2023%E2%80%BC%E2%83%25%20per%20Februari%202022>.
- Huruswati, I. (2006). Permasalahan Pekerja Migran Di Daerah Perbatasan: Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 1-14.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat. 8 September 2023. <https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-daerah>
- Prihartini, N., & Surgani Firdania, M. (2023). Pemanfaatan Data Spasial Dalam Identifikasi Lahan Perkebunan Kopi Di Kabupaten Sambas. *Jurnal Patani: Pengembangan Teknologi Pertanian Dan Informatika*, 6(1), 18-23. <https://doi.org/10.47767/patani.v6i1.460>
- Rahmany, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja di Luar Negeri Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 51-73.
- Yuliati, D. (2019). Latar belakang pemilihan Jepang dan Korea sebagai negara tujuan TKI: Studi kasus di Desa Wonorejo Kabupaten Sragen. Skripsi. Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Sosiologi dan Antropologi.